

LITERASI SERTIFIKASI HALAL DI SENTRA WISATA KULINER (SWK) KOTA SURABAYA

Novy Yulia Sekar Putri¹

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY,

Email: novyyuliasekarp@gmail.com

Abstrak

Strategi sertifikasi halal ini dilaksanakan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi khususnya pada pelaku usaha yang ada di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya. Sertifikasi halal merupakan legalitas yang wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha baik barang maupun jasa, hal tersebut sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga sudah disebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal juga mendapat nilai positif dari para konsumen, dengan adanya sertifikasi halal maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen akan kehalalan suatu produk makanan dan minuman sehingga para konsumen tidak perlu takut bahwa produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi itu mengandung zat-zat berbahaya seperti yang dilarang oleh Pemerintah.

Kata kunci: Literasi, Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Perekonomian Islam di dunia, menurut Dinar Standart dalam *e-book* yang berjudul “*State of The Global Islamic Economy Report : Driving The Islamic Economy Revolution 4.0*”, mulai diperkenalkan pada tahun 2013 laporan tersebut mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “sektor-sektor yang produk dan layanan utamanya dipengaruhi oleh etika dan hukum Islam” yang mendorong kebutuhan konsumsi sekitar 1,8 Miliar konsumen Muslim yang ada di seluruh dunia.

Isu keharaman suatu produk makanan, minuman, dan obat-obatan selalu mencuar di kalangan masyarakat muslim. Pada tahun 2001, muslim Indonesia dihebohkan dengan produk *Monosodium Glutamate* (MSG) yang dalam proses produksinya menggunakan katalis dari *Bactosoytone* yang mengandung enzim dari hewan babi. Enzim babi tersebut tidak terdeteksi pada produk akhir dari pembuatan MSG, namun karena adanya pemanfaatan (*intifa'*) zat haram pada saat proses produksi, maka produk tersebut dihakimi haram. Berdasarkan temuan tersebut, sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dicabut dan produsen harus menarik seluruh produk yang telah beredar diseluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui sertifikasi ulang dengan mengganti katalis enzim babi menjadi enzim sapi, produk ini dinyatakan halal dan beredar di masyarakat.

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa

tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Pasca implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara *voluntary* adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari'at Islam. Dengan adanya sertifikat halal, produsen boleh mencantumkan logo atau label "halal" pada kemasan produk makanannya. Sehingga, dengan disertakan label atau logo "halal" pada kemasan tersebut, produk makanan dijamin kehalalannya. Konsumen tidak perlu menguji terlebih dahulu sebelum membeli dan mengkonsumsinya.

Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label/tanda halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih saja terkesan sektoral dan parsial. Kesan itu, misalnya terlihat ketika mencermati Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada makanan, dan kesimpulan Mudzakarrah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.

Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) berupaya mengelola permasalahan di area Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan membuat "Sentra untuk perdagangan para PKL". Pembangunan sentra tersebut merupakan solusi atas beberapa permasalahan terkait PKL, di antaranya adalah terganggunya keindahan tata kota, terhambatnya aktivitas pejalan kaki di trotoar, lalu lintas menjadi tidak lancar dan lain sebagainya.

Di antara beberapa sentra yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah Sentra Wisata Kuliner atau lebih singkatnya SWK. Tujuan dari didirikannya SWK adalah untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha, sekaligus sebagai tempat bagi para masyarakat untuk bisa berwisata kuliner di dalam kota dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia, produksi, serta keuangan.

Surabaya mengalami kemajuan yang sangat pesat dari segi tempat wisata yang berkaitan dengan kuliner. Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah mulai menjamur di Kota Surabaya dengan tujuan untuk membangkitkan perekonomian

masyarakat. Namun, di beberapa SWK binaan dari Pemkot Surabaya masih kurang mendapat tempat dan perhatian dari masyarakat. Meski sudah mendapat bantuan dari Pemkot, para pelaku usaha di SWK masih belum optimal. Salah satunya yang diungkapkan oleh ibu Nia, salah satu pelaku usaha kuliner jenis nasi sambal.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai sertifikasi halal yang mempengaruhi minat beli dari konsumen, dan juga penjual merasa aman karena produk yang dijual sudah sesuai dengan syariat Islam dan telah bersertifikasi halal, tetapi masih belum ada yang membahas mengenai produk makanan dan minuman yang ada di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya. Atas dasar belum adanya hasil temuan strategi sertifikasi halal di Kota Surabaya sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Strategi Sertifikasi Halal di Kota Surabaya.

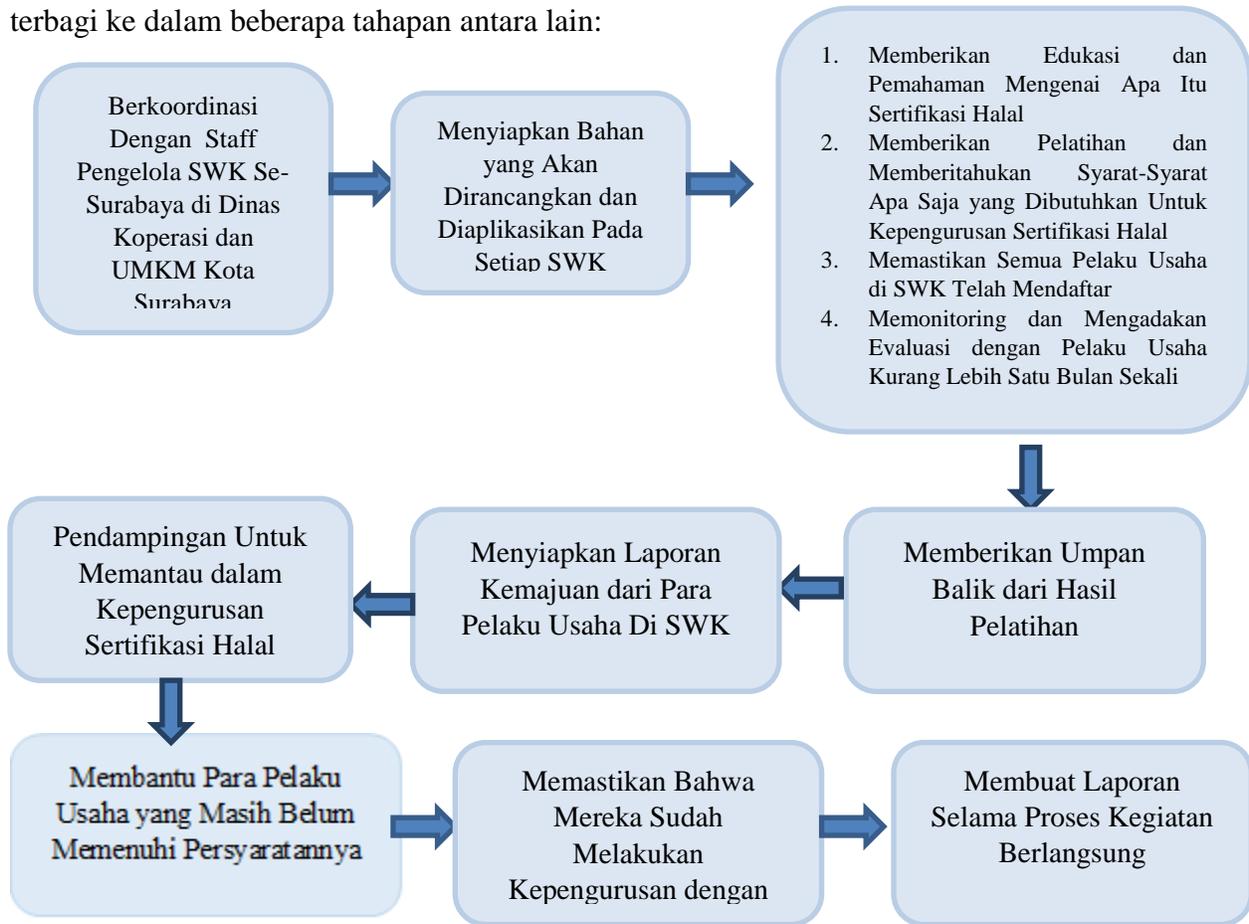
No	Sentra Wisata Kuliner (SWK)	Alamat
1.	SWK Dukuh Menanggal	Jl. Dukuh Menanggal No.1A, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234
2.	SWK Jambangan	Jl. Jambangan Kebon Agung No. 71A, Jambangan, Surabaya, Surabaya City, East Java 60232
3.	SWK Bratang Binangun	Jl. Bratang Binangun
4.	SWK Dharmawangsa	Jl. Raya Dharmawangsa
5.	SWK Taman Prestasi	Jl. Ketabang Kali

METODE PELAKSANAAN

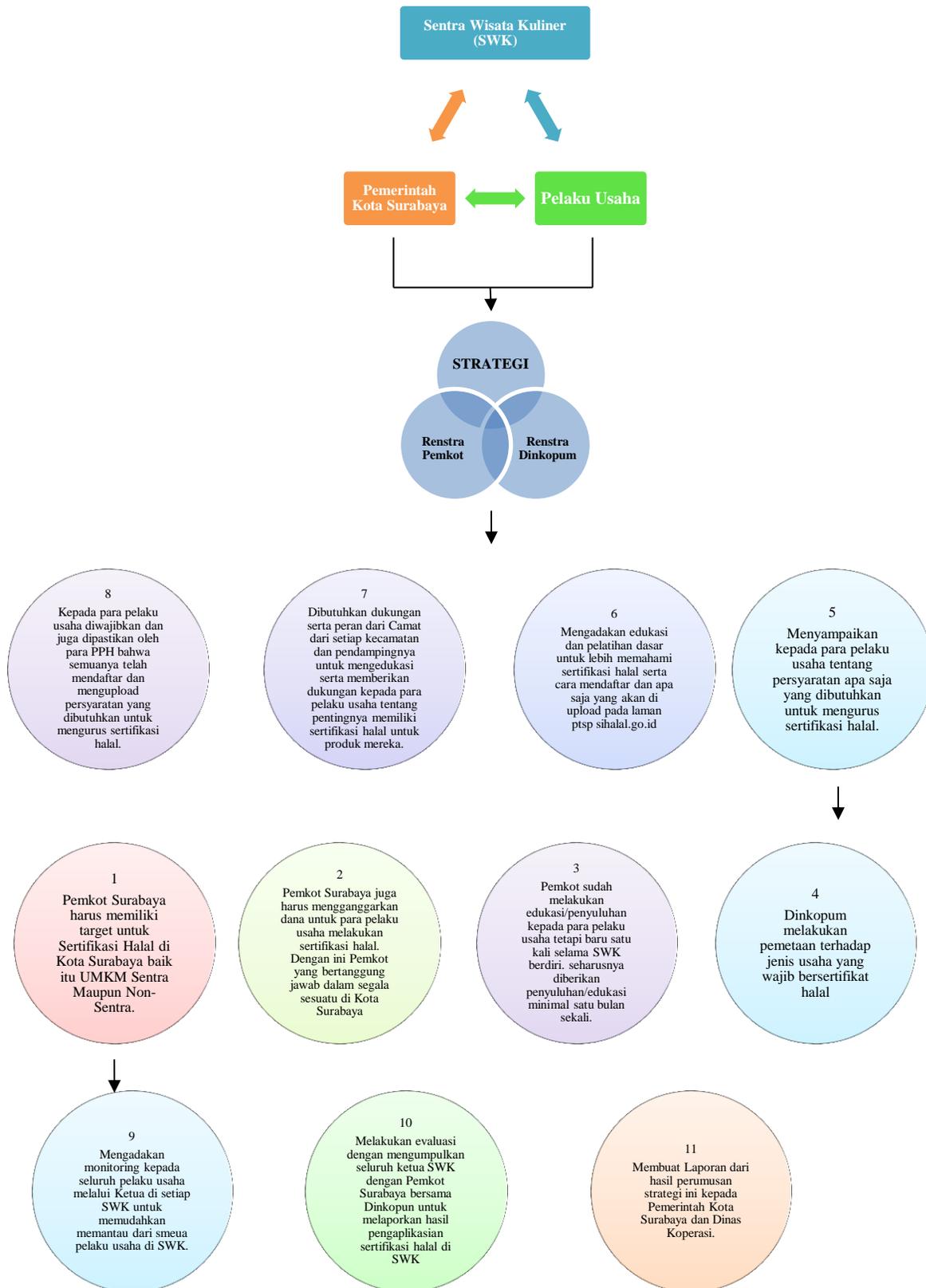
Kegiatan ini dimulai dari bulan januari hingga bulan mei 2022 dengan tujuan ntuk mengetahui apakah para pelaku usaha sudah memahami apa itu sertifikasi halal yang sudah mulai di terapkan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tahap awal pelaksanaan ini, yaitu melakukan observasi di lima Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya dengan menganalisis situasi melalui diskusi dengan para pelaku usaha guna memperoleh permasalahan utama yang dihadapi serta solusi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil observasi permasalahan utama yang dihadapi adalah belum memahaminya tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Kegiatan selanjutnya adalah mengedukasi, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi dengan para ketua yang ada di Sentra Wisata Kuliner (SWK) serta dengan staff pengelola Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang ada di Dinkopum Kota Surabaya dengan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai apa itu sertifikasi halal dan betapa pentingnya suatu produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal serta dampaknya pada perekonomian dari para pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kegiatan ini dilakukan secara luring guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan terbagi ke dalam beberapa tahapan antara lain:



Gambar 1 : Proses Pelaksanaan Menuju Temuan Penelitian



Gambar 2 : Strategi untuk Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan sertifikasi halal

Contoh Gambar/Foto:



Gambar 1. Observasi tentang literasi sertifikasi halal pada pelaku usaha di SWK

KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki strategi dan target yang jelas mengenai kewajiban BPJPH yang menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Belum siapnya Kota Surabaya menyambut sertifikasi halal yang membuat tidak ada di rencana strategis

Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang membahas mengenai sertifikasi halal. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya juga hanya melayani sertifikasi halal untuk produk UMKM Non-Sentra dan untuk Sentra sendiri masih belum memiliki kebijakan memiliki sertifikasi halal.

2. Tidak adanya model yang jelas dari Pemerintah Kota Surabaya mengenai sertifikasi halal ini sendiri, maka dari itu penulis ingin merancang model yang nantinya akan diaplikasikan di satu SWK dan jika berhasil maka akan diterapkan di seluruh SWK yang tersebar di seluruh Kota Surabaya dengan menimbang beberapa aspek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada segenap pengurus Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya serta pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dukuh Menanggal, SWK Jambangan, SWK Bratang Binangun, SWK Dharmawangsa, dan SWK Taman Prestasi. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat / PPPM Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah memberikan kesempatan Tim Pengabdian untuk melaksanakan rancangan kegiatan, serta semua pihak yang telah membantu proses pengabdian masyarakat dan pelaporan kegiatan.

DAFTAR RUJUKAN

Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah. 'The Role Of The State In The Islamic Economic System: A Review Of Abbas Mirakhor's Thought'. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (16 August 2021): 1–22.

<https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>.

Bogor Agricultural University, T. Maryati, R. Syarief, Bogor Agricultural University, R. Hasbullah, and Bogor Agricultural University. 'Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)'. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4, no. 3 (31 October 2016): 364–71. <https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371>.

aan, -. 'Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal'. *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (1 March 2018): 43.

<https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1177>.

Universitas Ciputra, Universitas Ciputra. 'Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ciputra, "Program Sentra Wisata Kuliner,"'. Surabaya: Universitas Ciputra, 2018.

<https://www.uc.ac.id/lppm/pengabdian-masyarakat/program-swk/>;

Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. 'Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia'. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 July 2020): 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.